

POTRET PERMASALAHAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI NUSA TENGGARA TIMUR

Dhiu Margaretha

FKIP Universitas Katolik Widya Mandira

dhiumertha@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.24071/snffield.2021.31>

Abstrak

Nusa Tenggara Timur termasuk dalam daerah 3T memiliki permasalahan pendidikan yang kompleks, baik yang berkenaan dengan kepala sekolah, guru, peserta didik, fasilitas, maupun berkaitan dengan akses yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang keadaan pendidikan sekolah dasar, di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis studi kasus, yang melibatkan dua belas (12) sekolah dasar di Kecamatan Amarasi Selatan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil studi mengungkapkan bahwa kepala sekolah sebagai penggerak praktik baik di sekolah yang dipimpinnya, cenderung pasrah pada keadaan dan enggan keluar dari zona nyamannya. Guru menghadapi masalah latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, jaminan kesejahteraan yang tidak adil, dan daya juang yang rendah. Peserta didik membutuhkan pendampingan dari guru dan orang dewasa lainnya agar memiliki motivasi untuk bereksplorasi, mencari, dan belajar. Masalah – masalah tersebut membutuhkan perhatian yang serius dari para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan agar pendidikan di Nusa Tenggara Timur dapat berkembang sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Kata Kunci : pendidikan, potret permasalahan, sekolah dasar

Pengantar

Pendidikan di Indonesia menghadapi permasalahan yang kompleks, dan sulit ditemukan pokok persoalannya. Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah dijalani selama hampir 76 tahun belum membawa banyak perubahan yang berarti di bidang pendidikan, terlebih di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Baik dalam skala nasional maupun di daerah 3T, permasalahan pendidikan muncul mulai dari aspek masukan (misalnya penerimaan peserta didik baru, seleksi masuk), proses (misalnya pembelajaran, penilaian, motivasi dan daya juang peserta didik dan guru, kompetensi dan kinerja guru, pengawasan dan pembinaan, tanggung jawab pendidikan oleh orang tua, peran masyarakat dalam pendidikan di sekolah), dan hasil (misalnya ujian dan penilaian, standar kelulusan).

Para pendiri bangsa sudah menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 harus diikuti dengan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesadaran ini dituangkan dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang secara jelas

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (sesudah amandemen). Hal ini mengandung makna yaitu seluruh rakyat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang layak merupakan modal utama bagi setiap orang untuk menjalani hidup yang lebih berkualitas di tengah persaingan yang makin ketat di era globalisasi saat ini.

Indonesia merupakan negara multikultural yang sangat berpeluang untuk terjadinya konflik antar etnis dalam masyarakat, jika perbedaan dan kesenjangan pembangunan di berbagai bidang termasuk pendidikan tidak segera dijumpai. Berkaitan dengan hal itu, Indonesia harus mengimplementasikan pendidikan multikultural dengan berfokus pada 1) daerah, etnis, dan tradisi, 2) keyakinan, dan 3) toleransi (Zarbaliyev, 2017). Selain itu, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, Indonesia menghadapi persoalan pendidikan yang begitu kompleks, baik yang bersumber dari hambatan geografis, konsep, peraturan, anggaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, maupun berkaitan dengan pelaksanaannya. Persoalan ini terutama dialami oleh masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan terutama berkaitan dengan mutu yang rendah, kesempatan memperoleh pendidikan yang belum menjangkau semua orang, serta sarana dan prasarana yang masih sangat kurang. Padahal pendidikan adalah investasi atau modal utama dalam pembangunan masyarakat dan bangsa yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut, Abbas (2019:99) secara jelas mengemukakan :

Memperoleh pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara di seluruh pelosok negeri, oleh karena itu, harus mengintegrasikan nilai-nilai universal HAM ke dalam seluruh proses perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan di semua jenjang, jenis, dan jalur melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai (*availability*), perluasan kesempatan (*accessibility*), peningkatan mutu dan relevansi (*acceptability*), dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip negara dan landasan yuridis bangsa (*adaptability*).

Indonesia sampai saat ini masih menghadapi permasalahan terkait pemerataan pendidikan dengan akses yang sulit di daerah-daerah 3T sehingga terjadi perbedaan kemajuan antar daerah. Seperti yang terjadi di kepulauan Pongok dan Celagen Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di mana sangat sedikit lulusan SMA yang meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disebabkan karena mayoritas orang tua mereka bekerja sebagai nelayan dan petani yang disinyalir tidak ada kemauan untuk menyekolahkan anak mereka, masih ada banyak guru yang tidak memenuhi standar kualifikasi akademik yang dipersyaratkan (lulusan strata 1 kependidikan), dan koleksi buku di perpustakaan sekolah yang lebih fokus pada buku teks dan pengayaan, sedangkan buku penunjang lainnya sangat minim (Rahmadi, 2020).

Contoh lain masalah pendidikan di daerah 3T seperti yang ditemukan oleh Yosada (2016) di perbatasan Entikong Sanggau Kalimantan Barat yakni tenaga pendidiknya kurang, kesejahteraan guru rendah, fasilitas fisik sekolah tidak memadai, akses ke sekolah buruk karena medan yang sulit dilewati, serta kesadaran akan pentingnya pendidikan yang kurang. Lain lagi seperti di Sambas (Kalimantan

Barat) dan Mamberamo Raya (Papua) di mana ketidakhadiran guru di sekolah – sekolah pedesaan sangat tinggi yang disebabkan karena rendahnya kesejahteraan guru, perilaku konsumtif guru yang menyebabkan gaji mereka tidak pernah cukup sehingga mereka menghabiskan banyak waktu untuk mencari pendapatan lain, jumlah guru yang sangat sedikit sehingga seorang kepala sekolah dapat merangkap menjadi guru atau seorang guru harus mengajar 2 sampai 3 kelas, sulitnya akses ke sekolah karena cuaca buruk, lokasi tempat tinggal yang jauh dari sekolah, serta keterpencilan daerah tempat mereka tinggal yang mengisolasi mereka dari banyak fasilitas umum (Febriana, dkk, 2018).

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, tampak ada kesamaan masalah pendidikan di daerah 3T yaitu berkaitan dengan masalah kepala sekolah, guru, pemerataan akses, dan sarana dan prasarana; walaupun disadari memang ada variasi permasalahan yang khas menurut keadaan masing-masing daerah.

Khusus berkaitan dengan kepala sekolah, dalam pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ditegaskan bahwa, beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Beban kerja yang dilaksanakan kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Contoh penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, menjelaskan bahwa kualifikasi akademik, kepemimpinan kepala sekolah, dan kesejahteraan, secara signifikan mempengaruhi profesionalisme guru SD. Selain itu, kepala sekolah tidak melaksanakan supervisi akademik yang terprogram dan berkelanjutan, tetapi hanya dilakukan pada saat ada acara tertentu, hanya menekankan pada supervisi administrasi, belum ada apresiasi dan penghargaan terhadap guru, fasilitas penunjang pembelajaran yang belum memenuhi syarat, serta kurangnya pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas menyebabkan guru tidak menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya (Nugroho, 2014). Di daerah-daerah 3T lainnya, persentase kepala sekolah layak hampir semuanya di bawah persentase nasional, yang berarti banyak kepala sekolah di daerah 3T tidak layak dari segi kemampuan, kompetensi, dan latar belakang pendidikan (Bappenas, 2016). Dukungan kepemimpinan seorang kepala sekolah menjadi problem tersendiri dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Di daerah 3T, kepemimpinan unggul dominan belum sepenuhnya dimiliki oleh seorang kepala sekolah, dan hal ini mempengaruhi proses pendidikan di sekolah (Juharyanto: 2017).

Tentang guru, di daerah 3T, jumlahnya masih sangat kurang, penyebaran yang tidak merata dan berimbang, kemampuan profesional tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang kerja, rasio guru siswa berada di bawah angka nasional 14,73, rasio guru/sekolah di bawah angka nasional 18,41, dan persentase guru layak di bawah angka nasional 87,25% (Bappenas, 2014). Berkaitan dengan profesionalisme guru, dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SD/MI, secara tegas diuraikan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan formal minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI), atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Tuntutan agar seorang guru harus memenuhi kualifikasi akademik D-IV/S1 kependidikan, didasarkan pada alasan karena SD adalah jenjang pendidikan yang menjadi fondasi untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Supaya peserta didik dapat berhasil pada jenjang yang lebih tinggi, maka proses pendidikan pada tingkat di bawahnya harus diselenggarakan dengan baik. Kesalahan yang terjadi pada pada jenjang pendidikan dasar akan menghambat perkembangan konsep anak pada jenjang selanjutnya. Untuk dapat membantu perkembangan anak SD dalam semua aspeknya dibutuhkan guru yang cakap, kreatif, berpikiran maju, menggunakan pendekatan pembelajaran yang cocok dengan kemampuan mereka, memiliki integritas, serta memiliki kematangan pribadi dan emosional.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan profesionalisme guru. Profesionalisme guru SD di Kabupaten Batubara Sumatra Utara sangat rendah dengan rata-rata kompetensi 39,61, berada di bawah nilai rata-rata provinsi maupun nasional (Setiawan & Sitorus, 2017). Selain itu, ditunjukkan juga oleh hasil studi Yosi, dkk (2020) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang menemukan bahwa kompetensi kepribadian guru masih bermasalah yang tampak dalam ketidakmampuan mengontrol emosi ketika berhadapan dengan peserta didik.

Khusus yang berkaitan dengan peserta didik, penelitian tentang ketidakhadiran guru di sekolah pedesaan (Sambas, Kalimantan Barat & Mamberamo Raya, Papua) menemukan bahwa peserta didik tidak termotivasi untuk aktif dalam proses belajar karena guru mereka jarang datang ke sekolah dengan berbagai sebab (Febriana, dkk, 2018). Selain itu, studi yang dilakukan oleh Prouty (2012) di Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa peserta didik sesungguhnya mempunyai motivasi untuk belajar, namun ketidakhadiran guru di sekolah melemahkan motivasi mereka.

Ada studi lain berkaitan dengan pendidikan daerah 3T seperti di Kabupaten Mahakam Hulu (Putera & Rhussary, 2018), di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Gighile, Tulusan, & Londa, 2018), di Kabupaten Lombok Timur (Fachrudin, Martono, dan Murtini, 2017), Suku Dayak di Pedalaman Kalimantan Tengah (Bunu, 2014).

Terinspirasi oleh berbagai studi yang telah dilakukan di daerah 3T lainnya, penelitian ini dilakukan pada sekolah dasar di Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mencoba menelisik keadaan pendidikan di sana, yang berkaitan dengan keadaan sekolah, kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Sangat disadari bahwa ada keterbatasan penelitian baik dalam cakupan, konteks, maupun wilayahnya, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat memberi gambaran yang lebih luas mengenai keadaan pendidikan baik di Kabupaten Kupang maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apalagi dalam konteks nasional.

Ada tiga alasan dasar dipilihnya sekolah dasar di lokasi ini yaitu *pertama*, sekolah dasar adalah jenjang pendidikan yang meletakkan dasar bagi pendidikan pada jenjang selanjutnya; *kedua*, letak Kecamatan Amarasi Selatan tidak terlalu jauh dari Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bisa ditempuh dalam 1 jam perjalanan; *ketiga*, jumlah sekolah dasar di Kecamatan Amarasi Selatan sedikit (ada 12 sekolah) dibandingkan dengan jumlah sekolah dasar di kecamatan lain se kabupaten Kupang, sehingga mudah dijangkau.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, pendidikan di provinsi ini menghadapi banyak tantangan yang disebabkan karena kondisi geografis, fasilitas

pendidikan yang belum layak, banyak guru yang berkualitas rendah, dan pembangunan sekolah yang tidak melalui studi kelayakan sehingga ada 2 sampai 3 sekolah di desa yang sama; hal ini menyebabkan tidak meratanya sebaran peserta didik (ada sekolah yang peserta didiknya lebat dan ada sekolah yang peserta didiknya sangat sedikit).

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi), alat pengumpul data yang dipakai adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar studi dokumen. Lokasi penelitian di Kabupaten Kupang dengan fokus pada sekolah dasar di Kecamatan Amarasi Selatan, sedangkan subyek penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Waktu penelitian Januari – Mei tahun 2019.

Analisis data menggunakan teori dari Miles dan Hubberman. (Sugiyono, 2013 : 246-253), mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan 3 langkah kegiatan yang dilakukan secara simultan yakni (1) reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola; (2) penyajian data, yakni penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat (teks yang bersifat naratif), bagan, dan hubungan antar kategori; yang memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan tindakan selanjutnya; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yakni memberi arti, mencatat urutan dan pola, serta penyimpulan.

Sedangkan untuk pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2013: 269-277) mengemukakan bahwa uji keabsahan data meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan, dokumen; baik dokumen-dokumen sekolah maupun dokumen dari Badan Pusat Statistik, yang berkaitan dengan tiga komponen utama pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran umum

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia yang menempati urutan ke 3. Berdasarkan data dari BPS Nasional, tingkat kemiskinan di NTT : 21%. Penyebabnya adalah pembangunan yang kurang merata, tingkat pendidikan yang masih rendah, pertumbuhan ekonomi terhambat, serta produktivitas yang rendah. Dari 22 kabupaten kota yang ada, terdapat 18 kabupaten yang tergolong daerah 3T di NTT, terdiri dari 7 kabupaten terdepan dan 11 kabupaten tertinggal. Rinciannya seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Kabupaten Terdepan di Provinsi NTT

No	Kabupaten
1	Kupang
2	Timor Tengah Utara
3	Belu
4	Alor
5	Rote Ndao
6	Sabu Raijua
7	Malaka

Tabel 2. Daftar Kabupaten Tertinggal di Provinsi NTT

No.	Kabupaten
1	Sumba Barat
2	Sumba Timur
3	Timor Tengah Selatan
4	Lembata
5	Ende
6	Manggarai
7	Manggarai Barat
8	Sumba Tengah
9	Sumba Barat Daya
10	Nagekeo
11	Manggarai Timur

Sumber : BPS Nasional 2019

Kupang sebagai satu dari 7 kabupaten terdepan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 24 kecamatan yaitu 1) Kupang Timur, 2) Kupang Tengah, 3) Fatuleu, 4) Takari, 5) Amarasi, 6) Kupang Barat, 7) Amarasi Barat, 8) Amabi Oefeto Timur, 9) Taebenu, 10) Sulamu, 11) Amarasi Selatan, 12) Nekamese, 13) Amarasi Timur, 14) Amabi Oefeto, 15) Amfoang Selatan, 16) Fatuleu Tengah, 17) Semau, 18) Fatuleu Barat, 19) Amfoang Barat Laut, 20) Amfoang Timur, 21) Semau Selatan, 22) Amfoang Utara, 23) Amfoang Barat Daya, dan 24) Amfoang Tengah. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Amarasi Selatan.

Sebagai salah satu kabupaten terdepan di NTT, di Kabupaten Kupang, berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Rasio guru/sekolah : Nasional 18,41, Kabupaten Kupang 14,35.
 - 2) Persentase guru layak : Nasional 87,25%, Kabupaten Kupang 85,49%.
 - 3) Persentase kepala sekolah layak : Nasional 100%, Kabupaten Kupang 90,80%.
 - 4) Rasio siswa/guru : Nasional 14,73, Kabupaten Kupang 11,20.
 - 5) Rasio kepala sekolah/sekolah : Nasional 100, Kabupaten Kupang 65,41.
 - 6) Rasio siswa/rombel : Nasional 29,30, Kabupaten Kupang 24,36.
 - 7) Rasio rombel/ruang kelas : Nasional 1,02, Kabupaten Kupang 1,24.
 - 8) Angka putus sekolah : Nasional 0,52, Kabupaten Kupang 0,60.
- (Hasthoro, dkk :2016)

Berikut ini adalah gambaran keadaan SD di Kabupaten Kupang dan di Kecamatan Amarasi Selatan.

Tabel 3. Keadaan Sekolah Dasar di Kabupaten Kupang dan Kecamatan Amarasi Selatan tahun 2019

Aspek	Kab.Kupang			Kec.Amarasi Selatan		
	SD Negeri	SD Swasta	Total	SD Negeri	SD Swasta	Total
Jumlah SD	289	80	369	10	2	12
Jumlah Guru	2129	1068	3197	17	112	119
Jumlah Peserta Didik	28.650	9360	38.010	1004	261	1265

Sedangkan rincian SD di Kecamatan Amarasi Selatan sebagai berikut.

Tabel 4. Profil Sekolah Dasar Di Kecamatan Amarasi Selatan Tahun 2019

Nama SD	Peserta Didik	Rombel	Guru	R.Kelas	Lab	Perpus
SD GMIT Korooto Nekmese	80	6	8	12	0	2
SDI Buraen 1	82	6	13	6	0	0
SDI Buraen 2	138	6	12	6	0	1
SDI Nekmese	90	6	8	7	0	1
SDI Sahraen	48	6	9	6	0	1
SDN Buraen	203	11	18	12	0	1
SDN Naet	64	6	9	6	0	1
SDN Retraen	52	6	9	7	0	1
SDN Sahraen	146	6	7	7	0	1
SDN Sonraen	142	6	8	7	0	2
SDN Tarba	39	6	9	6	0	0
SDK Fransiskus Xaverius	181	7	9	6	0	1
Total	1265	78	119	88	0	12

Sumber: BPS Kabupaten Kupang 2019

Dari gambaran umum tersebut tampak bahwa ada 5 sekolah yang jumlah peserta didiknya di atas 100 orang, dan sisanya 7 sekolah yang peserta didiknya di bawah 100 orang, bahkan di bawah 50 orang. Hal ini terjadi karena letak sekolah yang saling berdekatan, dan orangtua cenderung memasukkan anaknya di sekolah dasar yang sudah lebih lama berdiri.

Khusus pada SD Inpres dan Negeri, penyebaran guru tidak merata karena tidak ada perbedaan jumlah guru pada sekolah-sekolah tertentu, padahal jumlah siswanya ada yang banyak dan ada yang lebih sedikit. Rata-rata di setiap sekolah ada 2 sampai 3 guru honor yang penghasilannya bergantung pada dana BOS. Hal ini menyebabkan jaminan kesejahteraan guru sangat rendah khususnya pada sekolah dengan jumlah siswa sedikit.

Selain itu hampir di semua sekolah ada perpustakaan, namun koleksi bukunya terbatas pada buku-buku pelajaran dan tokoh – tokoh/pahlawan. Ada sekolah yang memanfaatkan koleksi buku di perpustakaan untuk menjalankan gerakan literasi (membaca 15 menit sebelum pelajaran di mulai).

Kepala Sekolah

Sesuai data dari BPS Nasional, persentase kepala sekolah layak nasional adalah 100%, sedangkan kabupaten Kupang 90,80%. Hal ini berarti ada sekitar 10% kepala SD di Kabupaten Kupang yang tidak layak dari segi latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, dan kompetensi.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan kepala sekolah, berdasarkan wawancara diperoleh data yang menunjukkan ada 2 orang S1, 8 D-2 PGSD, dan 2 orang D-3 dengan latar belakang pendidikan guru agama (Kristen Protestan dan Katolik).

Sedangkan bila dilihat dari pelaksanaan jabatannya, ada seorang kepala sekolah yang merangkap jabatan sebagai kepala SMP satu atap, sehingga harus membagi waktu di dua sekolah (waktunya lebih banyak di SMP karena urusan di SMP lebih banyak). Selain itu, ada kepala sekolah yang merangkap menjadi guru agama karena latar belakang pendidikannya adalah guru agama.

Pada hampir semua sekolah, supervisi akademik jarang dilakukan, yang lebih banyak dilakukan adalah supervisi administrasi (memeriksa RPP, media pembelajaran, dan daftar hadir). Semua kegiatan yang dilakukan di sekolah harus “menunggu petunjuk” dari dinas, hanya sedikit kepala sekolah yang berinisiatif untuk melakukan praktik baik di sekolahnya, baik yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi sekolah dan pembelajaran, proses pembelajaran maupun berkaitan dengan pengembangan karakter.

Berdasarkan observasi diperoleh data sebagai berikut : Ada kepala sekolah yang hampir setiap hari hadir di sekolah pukul 8.30 karena tempat tinggalnya jauh (kecuali kalau ada kegiatan atau ada kunjungan pengawas, kepala sekolah datang lebih awal).

Ada kepala sekolah yang belum mampu menyusun renstra, renop, rencana tahunan pengembangan sekolah, rencana anggaran belanja sekolah, sehingga menyerahkan kepada wakil kepala sekolah atau menugaskan guru tertentu. Sebagian besar kepala sekolah tidak menguasai teknologi informasi, dan hanya mengandalkan guru tertentu atau operator sekolah (jika ada).

Di beberapa sekolah tersedia kantin permanen yang bagus tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produksi sekolah dan untuk mengembangkan karakter kebersihan dan kejujuran peserta didik.

Guru

- 1) Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT, data guru SD di Kecamatan Amarasi Selatan sebagai berikut :

Tabel 5. Profil Guru SD di Kecamatan Amarasi Selatan Tahun 2019

Nama SD	Jumlah	PNS	Status GTY	Honor	Kualifikasi S1	SPG/ PGA/ D2/ D3	Sertifi kasi
SD GMIT Korooto	8	0	2	6	3	5	1
SDI Nekmese	8	6	0	2	4	4	3
SDI Buraen 1	13	6	0	7	5	8	4
SDI Buraen 2	12	5	0	7	6	6	2
SDI Sahraen	9	3	0	6	3	6	1
SDN Buraen	18	8	0	10	10	8	7
SDN Naet	9	4	0	5	4	5	1

SDN Retraen	9	6	0	3	4	5	2
SDN Sahraen	7	4	0	3	3	4	2
SDN Sonraen	8	4	0	4	4	4	2
SDN Tarba	9	7	0	2	4	5	4
SDK F.Xaverius	9	2	6	1	5	4	2
Total	119	55	8	56	55	64	31

GTY: Guru Tetap Yayasan

Tabel 4 menunjukkan profil guru pada 12 sekolah dasar, di mana jumlah guru PNS dan guru honor berimbang, sedangkan jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru dengan tingkat pendidikan D2, D3, dan lulusan SPG dan PGA lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan guru yang berkualifikasi S1.

- 2) Berdasarkan data dari Dinas P & K Provinsi NTT, skor rata-rata kompetensi dan kinerja guru SD di Kabupaten Kupang berdasarkan sertifikasi guru sebagai berikut :

Tabel 6. Skor Rata-Rata Kompetensi dan Kinerja Guru SD di Kabupaten Kupang Tahun 2012

Aspek	Status Guru	
	Belum Tersertifikasi	Sudah
Tersertifikasi		
Kompetensi	3,50	3,42
Kinerja	3,47	3,42

(Bersumber pada data penelitian Rosyidi, 2012)

Dari data tersebut, tampak bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara kompetensi dan kinerja guru SD yang belum dan yang sudah tersertifikasi, walaupun hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa rata – rata kompetensi dan kinerja tersebut berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan studi dokumen dan wawancara diperoleh data sebagai berikut: dilihat dari kualifikasi akademik guru, sebagian besar guru yang berijazah S1 PGSD dan S1 bidang lain (Teknologi Informasi, PJKR, Pend. Biologi, Pend. Bahasa Indonesia, Bimb. & Konseling) adalah guru yang berstatus guru honor dengan masa kerja di bawah 5 tahun (menjadi guru setelah lulus kuliah) dan menjadi guru kelas. Artinya guru yang bersangkutan mengajar semua mata pelajaran, kecuali agama dan olahraga/kesenian.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, guru-guru dengan masa kerja di atas 5 tahun ada yang lulusan SPG, PGA, D-2, dan S1. Ijazah D-2 dan S1 yang dimiliki oleh sebagian guru diperoleh melalui kuliah percepatan yang diselenggarakan oleh LPTK terdekat dan melalui Universitas Terbuka (dengan kegiatan kuliah 2 hari/minggu).

Mengenai jaminan kesejahteraan, guru honor menerima gaji berdasarkan jumlah siswa (dana BOS), sehingga besarnya antara Rp. 100.000 – Rp. 500.000 perbulan, yang diterima 3 bulan sekali. Jaminan kesejahteraan yang sangat rendah ini menyebabkan guru sering tidak masuk sekolah. Namun di sisi lain mereka tidak mau keluar dengan alasan susah cari kerja. Ada guru yang sudah bekerja 15 - 20

tahun masih berstatus guru honor dengan honorarium Rp. 500.000 ditambah insentif daerah.

Berkaitan dengan administrasi pembelajaran, ada sebagian guru yang tidak menyusun sendiri RPP, LKS dan portofolio peserta didik, tetapi mengambil RPP dari internet, padahal sudah ada pelatihan penyusunan RPP. Alasannya jika ada kemudahan mengapa tidak dimanfaatkan, beban administrasi terlalu banyak, selain itu juga untuk menghemat waktu. Selain itu sebagian besar guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan dan menyiapkan media pembelajaran.

Sedangkan berkaitan dengan proses pembelajaran, guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran tematik terpadu karena sulit menemukan tema yang dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran.

Berdasarkan observasi diperoleh data sebagai berikut :

Ada guru yang berlatar belakang guru agama, pend. biologi, guru BK, PJKR, pend. Bahasa Indonesia, dan Teknologi Informasi menjadi guru di kelas tinggi. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran sangat bergantung pada pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan yang dimiliki oleh guru. Ada mata pelajaran – mata pelajaran tertentu yang mudah dikuasai oleh guru karena sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan ada mata pelajaran yang tidak dikuasai oleh guru sehingga proses pembelajaran berjalan seadanya.

Berkaitan dengan disiplin masuk sekolah, jika ada urusan keluarga, guru sering meninggalkan kelas (rata-rata 3-5 hari) dan kelasnya dititip pada teman guru atau kepala sekolah yang mengambil alih kelas. Selain itu, guru yang sedang mengikuti kuliah baik program percepatan maupun kuliah di Universitas Terbuka sering meninggalkan kelas lebih awal atau bahkan ada yang tidak masuk sekolah dengan alasan harus mengikuti kuliah (2X/minggu).

Ada beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan tertentu. Salah satu bentuk binaan adalah menghadirkan mahasiswa-mahasiswa terbaik dari LPTK yang ada di Pulau Jawa untuk memberi contoh bagi guru dalam pembelajaran bidang studi tertentu (Matematika dan IPA terpadu). Kesempatan ini justru dimanfaatkan oleh guru untuk meninggalkan sekolah atau bahkan tidak ke sekolah dan menyerahkan kelasnya kepada mahasiswa.

Di beberapa sekolah ada media pembelajaran seperti KIT IPA tetapi tidak dimanfaatkan, karena guru tidak belajar cara kerjanya sehingga tidak dapat digunakan. Hal ini dapat disebabkan oleh latar belakang pendidikan sebagian guru yang tidak sesuai untuk menjadi guru SD. Dalam proses pembelajaranpun sebagian besar guru jarang menggunakan media pembelajaran untuk mengkonkritkan konsep tertentu agar peserta didik mudah memahami materi.

Peserta Didik

Mayoritas orangtua peserta didik bekerja sebagai petani. Jika musim tanam dan musim panen tiba, cukup banyak peserta didik yang absen sekolah karena orangtua menuntut mereka ikut bekerja di kebun; ada juga peserta didik yang membantu orang tua membawa hasil kebun untuk dijual di pasar. Selain itu, jika ada pesta adat, cukup banyak peserta didik yang tidak masuk sekolah karena mengikuti pesta.

Di beberapa sekolah, setiap hari jumat banyak peserta didik yang absen sekolah karena menurut mereka waktu belajar di sekolah pada hari itu pendek, sedangkan hari sabtu biasa digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang sering

digunakan untuk rapat guru sehingga peserta didik tidak ada kegiatan (di beberapa sekolah hari sabtu siswa dibiarkan bermain dan dipulangkan jika jam sekolah sudah usai). Selain itu, hari sabtu ada peserta didik yang melakukan kegiatan keagamaan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi beberapa hal yang selama ini belum terungkap baik yang berkaitan dengan kepala sekolah, guru, maupun peserta didik yang menjadi fokus penelitian ini. Namun penelitian ini juga sekaligus mengungkap hal – hal yang lain seperti : 1) Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran seperti perpustakaan, ada 10 sekolah memiliki perpustakaan dan 2 sekolah yang tidak memilikinya. Di perpustakaan yang ada, hampir 90% koleksi buku yang dimiliki adalah buku pelajaran; sedangkan pedoman untuk guru, buku penunjang, dan buku sumber yang lain sangat sedikit; 2) Perbandingan antara guru PNS dengan guru honor hampir seimbang, yang sekaligus memberikan informasi mengenai jaminan kesejahteraan yang tidak berimbang. Pada dasarnya ada 4 status guru jika dikaitkan dengan sumber dana penggajian yaitu PNS dengan sumber gaji APBN, Guru Tetap Yayasan dengan sumber gaji yayasan (untuk sekolah swasta), guru kontrak dengan sumber gaji APBD, dan guru honor dengan sumber gaji dana BOS dan uang komite; 3) Kewajiban seorang guru honor sama dengan kewajiban yang diemban oleh seorang guru PNS baik yang belum tersertifikasi maupun yang belum, namun hak yang diperoleh guru honor jauh lebih rendah.

Selain tiga hal di atas, dari data yang diperoleh tampak bahwa skor rata-rata kompetensi dan kinerja guru SD yang belum dan yang sudah tersertifikasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (data tahun 2012, yang mungkin ada perubahan di tahun-tahun sesudahnya). Berkaitan dengan hal itu, sudah ribuan guru dari tingkat SD sampai SMA/SMK di NTT yang tersertifikasi, namun sampai saat ini jika berbicara tentang mutu pendidikan posisi NTT masih menempati 3 urutan terbawah.

Berkaitan dengan kondisi ini, seringkali kepala sekolah dan guru berpandangan bahwa ijazah setingkat S1 yang sudah mereka peroleh, dengan sendirinya membuktikan bahwa kompetensi mereka tidak diragukan lagi setelah bertahun – tahun menjadi guru. Padahal ilmu pengetahuan dan teori terus berkembang, dengan demikian seharusnya profesionalitas juga semakin berkembang. Seorang pemimpin (dalam hal ini kepala sekolah), harus terus belajar mengembangkan kemampuan profesionalnya agar ia mampu merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan yang berkualitas sejalan dengan harapan pemerintah dan masyarakat (Wilson & Xue, 2013).

Pada sisi lain, penelitian ini belum meninjau secara lebih komprehensif tentang kualitas kompetensi dan pola kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru secara menyeluruh, motivasi berprestasi, daya juang, serta karakter peserta didik, yang semuanya berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Munc (Gessler & Ashmawy, 2016) mengemukakan bahwa “kepala sekolah memainkan peran kunci dalam desentralisasi politik, di mana mereka mendorong sekolah untuk menetapkan rencana, profil sekolah dan programnya secara kolektif dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memainkan peran kunci dalam mengatur dan memperkuat ikatan antara sekolah dan dunia luar”. Selain itu, kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin sekaligus manajer di sekolah yang dipimpinnya untuk menentukan keberhasilan dan ketercapaian visi, misi, dan tujuan sekolah; sehingga dia dituntut

untuk mengambil keputusan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sekolah serta meningkatkan komitmen orang-orang yang bekerjasama dengannya (Saputra, Adha, Sumarsono, 2019).

Sedangkan “guru yang berkualitas harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kepribadian yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan” (Yosi, Kurniawan, dan Syahrilfudin, 2020). Untuk itu, guru perlu terus berupaya meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan terus belajar (Al Rasyid, 2013).

Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa harus ada penelahaan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dalam hal ini, pembuat kebijakan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) perlu meningkatkan kuantitas maupun kualitas pendidikan di daerah 3T, sehingga semua sekolah baik di kota dan di desa, di semua daerah tanpa terkecuali, di seluruh Indonesia (dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote), memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Postman (2019) menyimpulkan bahwa sesungguhnya banyak persoalan pendidikan yang dialami disebabkan karena orang dewasa tidak mengetahui bagaimana seharusnya mendidik orang muda menjalani kehidupan dengan mengedepankan keberagaman budaya (bahasa, agama, adat istiadat, dan seni), sehingga membuatnya tidak tercerabut dari akarnya.

Manusia adalah makhluk multidimensional yang pengembangan kepribadian dan potensinya sangat bergantung pada proses pendidikan yang dialaminya. Hal ini disebabkan karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kualitas manusia ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dialaminya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Hal ini berarti bahwa mutu hasil yang dicapai sangat bergantung pada mutu proses yang dialami.

Ada banyak solusi yang dipaparkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pembenahan kurikulum, peningkatan kemampuan guru dalam mengimplementasi kurikulum, dan komitmen pemerintah pusat dan daerah, seperti yang dikemukakan oleh Sukasni dan Efendi (2017). Berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam peningkatan pendidikan, di dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 2 dinyatakan bahwa bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Isi ayat 2 tersebut secara tegas menunjukkan bahwa semua masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menempuh pendidikan dasar tanpa biaya karena pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, sudah banyak strategi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kebijakan sekolah satu atap, guru garis depan (GGD), pelibatan pihak swasta dalam membantu pengembangan pendidikan di daerah 3T, kerjasama kemdikbud dengan TNI AD untuk mengatasi kekurangan guru di perbatasan, dan kerjasama kemdikbud dengan TNI AD untuk mengatasi kekurangan guru di perbatasan (Kemdikbud, 2019); Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MMBI) yang meliputi 1) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dan Kewenangan Tambahan (PPGT), 2) Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), dan 3) Program Pendidikan Profesi Guru Kolaboratif (PPG Kolaboratif) (Dudung dkk, 2018); sedangkan Kementerian

Agama dengan program bina kawasan (Safii, 2018), namun sampai saat ini belum membuahkan hasil.

Untuk itu, para pembuat kebijakan (dari pusat sampai daerah), pendidik, orangtua dan masyarakat harus saling mendukung untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Perlu disadari bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya adalah anak bangsa yang memiliki kesamaan hak. Pemerintah pusat dan daerah harus membuat perencanaan yang matang, dengan menggunakan pendekatan administratif maupun manajerial, memperhitungkan kekhasan, situasi, dan kondisi setiap daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan (Hakim, 2016). Sejalan dengan pendapat Hakim, Idrus (2012) menyimpulkan hasil penelitiannya yakni untuk meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi, efisiensi, dan pengelolaan pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh dan seimbang, dilihat dari kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Penelitian tentang model pendidikan di daerah 3T menyimpulkan bahwa model penyelenggaraan pendidikan untuk daerah 3T harus mengakomodir keberagaman kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat (berbasis kearifan lokal) yang mengedepankan prinsip ASICT (Assimilated and Accomodated, Supporting of, Innovative Thinking, Comprehensif and Technologycal Used) (Dudung dkk 2018).

Kesimpulan

Permasalahan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menuntut kerjasama dan keberpihakan dari pemerintah pusat dan daerah (melalui kebijakan dan pemerataan akses), kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kemampuan dan sungguh-sungguh mengimplementasikan kompetensi yang disyaratkan, orangtua yang adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, masyarakat yang mendukung melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta peserta didik yang siap belajar, mengasah IQ (kecerdasan akademis), AQ (ketahanan), dan EQ (kecerdasan emosional) sehingga siap menghadapi tantangan dan keterbatasan dengan cerdas, tahan uji, dan bijak. Jadi, permasalahan pendidikan di provinsi ini dapat ditemukan solusinya hanya jika semua pihak berpikir, merasa dan bertindak sesuai dengan porsinya untuk memberikan pendidikan yang baik dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan dan keberagaman kondisi sosial budaya NTT.

Daftar Pustaka

- Abbas, H. (2019). *Meluruskan arah pendidikan: isu-isu kritis pendidikan (solusi dan prospek)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Al Rasyid, H. (2013). Analisis standar kualifikasi akademik guru sd di kecamatan kras kabupaten kediri. *Jurnal Widyagogik*, 1(1), 1-16.
- Bappenas. (2014). Laporan akhir: kajian evaluasi program pembangunan dan pengembangan kawasan khusus dan daerah tertinggal. Jakarta : Direktorat Daerah tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan. Diakses 21 Maret 2021.
- Bunu, H.Y. (Oktober, 2014). Kesadaran masyarakat suku dayak terhadap pendidikan anak di pedalaman kalimantan tengah. *Cakrawala Pendidikan*, Th. XXXIII, 3, 445-453. Diakses 20 Maret 2021.
- Dudung, A., Sudrajat, A., Hasanah,U., Winingsih, L.H., Suprastowo, P., Irmawati, A., & Listiawati, N. (2018). *Model pendidikan daerah 3t berbasis kearifan lokal (model penyelenggaraan pendidikan untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan*,

- sosial, dan budaya setempat*). Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fachrudin., Martono, T., & Murtini, W. (2016). The effect of pedagogic competency, personality, professional and social competency teacher to study achievement of economic lesson in state senior high school of east lombok district, academic year 2015/2016. 2(1), 332-345.
- Febriana, M., Karlina, Y., Nurkamto, J., & Rochsantiningsih, D. (2018). Absensi guru di pedesaan indonesia: sebuah dilema. *ELLiC Proceedings 2*, 47-51, ISSN elektronik: 2579-7263, CD-ROM ISSN: 2579-7549.
- Gessler, M., & Ashmawy, I.K. (2016). The effect of political decentralization on school leadership in german vocational schools. *Journal of Educational Management Administration & Leadership*, 44(2):184-204. DOI: <http://doi.org/10.1177/1741143214549967>.
- Gighile, P.N., Tulusan, F.M.G., & Londa, V.Y. (2018). Implementasi kebijakan pendidikan dasar daerah kepulauan (suatu studi di kecamatan mangitu kabupaten kepulauan sangihe provinsi sulawesi utara). *Jurnal Administrasi Publik*. 4(55). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19743>. Diakses tgl 25 Mei 2021.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jurnal EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2(1), Maret 2016, 53-64. <https://doi.org/1030596/edutech.v2i1.575>.
- Hasthoro, H.A., & Ambarwati, N. (2016). *Analisis sebaran guru dikdasmen di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) : tinjauan sekolah menengah pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- Idrus, M. (2012). Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di daerah. *Psikopedagogia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 1(2) <https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603>.
- Juharyanto. (2017). Kepemimpinan unggul kepala sekolah dasar daerah terpencil (studi multisitus pada sekolah dasar di kabupaten bondowoso). *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*. 26(1). 89-100. 10.17977/um009v26i12017p089.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2016). Laporan akhir koordinasi strategis percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal untuk mendukung PP No. 78 Tahun 2014 dan Perpres No. 131 Tahun 2015. Jakarta : Direktorat Daerah tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan. Diakses tgl 20 Mei 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Mendikbud apresiasi pihak swasta bantu pengembangan pendidikan di daerah 3t. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat : Siaran Pers BKLM, Nomor : 303/Sipers/A5.3/IX/2019.
- Nugroho, P.J. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru SD daerah terpencil kabupaten gunung mas provinsi kalimantan tengah. *JPL Dinas Pendidikan Kab. Bondowoso*. 1(1), 19-32. <https://www.researchgate.net/publication/320414701>.

- Postman, N. (2019). *Matinya pendidikan : redefinisi nilai-nilai sekolah*. Penerjemah: Siti Farida. Yogyakarta: Immortal Publishing dan Octopus.
- Prouty, R. (2012). "Kami suka diajar" (studi tentang ketidakhadiran guru di papua dan papua barat. Diakses 20 Maret 2021.
- Putera, M. T., & Rhussary, M. L. (2018). Peningkatan mutu pendidikan daerah 3t (terdepan, terpencil, dan tertinggal) di kabupaten mahakam hulu, *Jurnal Tabula PPS Unimed* 6(1), 144-148.
- Rahmadi, I.F. (2020). Pendidikan di daerah kepulauan terpencil: potret siswa, guru, dan sumber belajar. *JPE (Jurnal Pendidikan Edutama)*. 7(1).75-84, <http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v7i1.756>.
- Rosyidi, U. (2012). Dampak sertifikasi guru dalam jabatan terhadap peningkatan kinerja guru. *Laporan Penelitian*. Jakarta : Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Diakses 21 Maret 2021.
- Saputra, B.R., Adha, M.A., & Sumarsono, R.B. (2019). Strategi pendekatan peran sebagai pemimpin dan keluarga yang diterapkan kepala sekolah untuk meningkatkan komitmen kerja guru di sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. 6(2). 122-129.
- Setiawan, D., & Sitorus, J. (2017). Urgensi tuntutan profesionalisme dan harapan menjadi guru berkarakter (studi kasus: sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten batubara). *Cakrawala Pendidikan*, Pebruari 2017, Th. XXXVI, No.1, 122-129.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukasni, A., & Efendi, H. (2017). The problematic of education system in indonesia and reform agenda. *International Journal of Education*. 9(3): 183. <https://doi.org/10.5296/ije.v9i3.11705>.
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3t (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat : Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153-171. DOI: <https://doi.org/10.26594/dirasat.v4i2.1535>.
- Wilson, M., & Xue, X. (2013). School leader perspectives on leadership learning preparation and continuing professional development in the chinese province of fujian: an explanatory study. *Educational Management Administration & Leadership*. 41(6): 800-818. <https://doi.org/10.1177/1741143213494187>.
- Yosada, K.R. (2017). Pendidikan di beranda terdepan negara perbatasan entikong. *Prosiding Seminar Nasional FE UNY: Penguatan Hubungan antara Pengembangan Ketrampilan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan Generasi Muda* (p.192-201). url: <http://eprints.uny.ac.id/41250/>
- Yosi, A., Kurniawan, O., & Syahrilfuddin. (2020). Analisis kompetensi kepribadian guru sekolah dasar gugus VII kecamatan tampan kota pekanbaru. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*. 12(2): 101-106. <https://doi.org/1017509/eh.v12i2.16978>.
- Zarbaliyez, H. (2017). Multiculturalism in globalization era: history and challenge for indonesia. *Journal of Social Studies*. 13(1). <https://doi.org/10.21831/jss.v13i1.16966>.